

PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN AKUNTANSI AKRUAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Puji Hastutik

puji.hsstutik@gmail.com

Akhmad Riduwan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of human resource competence and accounting implementation based on accrual to the quality of local financial statements. This research was conducted at the Regional government work Unit of Surabaya city government. The approach used in this research is quantitative. The samples in this research are 19 units of regional apparatus of 22 units of local apparatus existing in Surabaya city government with the number of respondents as many as 38 questionnaires. The respondents of this research are the head of department and head of finance department at the regional device work Unit. The data were collected by using questionnaires measured by likert scale. The analysis method used is multiple linear regression analysis. The results showed: human resources positively influenced the quality of local financial statements. This means that human resources are needed and improved so that the quality of financial reports produced can continue to increase. And than implementation of accrual basis accounting. This means that accrual-based accounting is more precise than cash-based accounting to accruals so that the resulting financial statements are more informative, reliable, relevant, and understandable.

Keywords: Quality of regional financial report, human resource competence, implementation of accrual based financial accounting.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan di satuan kerja perangkat daerah pemerintah kota Surabaya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Sampel pada penelitian ini yaitu 19 Satuan Kerja Perangkat Daerah dari 22 Satuan kerja Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kota Surabaya dengan jumlah responden sebanyak 38 kuisisioner. Responden penelitian ini adalah kepala dinas dan kepala bagian keuangan di satuan kerja perangkat daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuisisioner yang diukur dengan skala likert. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berarti kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan dan ditingkatkan sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat terus meningkat. Selanjutnya implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini berarti akuntansi berbasis akrual sangat tepat diterapkan dari pada akuntansi berbasis kas menuju akrual sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih informatif, andal, relevan, dan dapat dipahami.

Kata kunci: Kualitas Laporan Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber daya Manusia, Implementasi Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual

PENDAHULUAN

Dalam reformasi pengelolaan keuangan negara, akuntansi sektor publik mengalami perkembangan yang signifikan dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Perkembangan tersebut terkait dengan kebijakan sistem akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintah (SAP). Perkembangan tersebut dilakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam penyediaan informasi keuangan yang lebih akurat dan relevan secara transparan oleh instansi pemerintah.

Ketidakhahaman aparatur pemerintah daerah tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah menjadikan pendidikan dan pelatihan (diklat) sebagai upaya untuk mengatasi kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 101 pasal 10 tahun 2000 tentang pendidikan dan pelatihan pegawai negeri sipil yang

menyebutkan bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi pegawai negeri sipil salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksana program pendidikan dan pelantikan dalam jabatan.

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi merupakan suatu aset yang berharga bagi organisasi itu sendiri. Keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat dari kualitas sumber daya manusia yang berada didalamnya. Sumber daya manusia akan bekerja secara maksimal jika organisasi dapat mendukung kemajuan karir mereka dengan melihat kompetensi mereka yang sesungguhnya. Pengembangan sumber daya manusia yang mementingkan kompetensi akan meningkatkan produktivitas pegawai pemerintah sehingga diharapkan kualitas kerja yang dihasilkan dapat menguntungkan dan kepuasan masyarakat dapat tersampaikan. Pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi dilakukan agar bisa memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja strategis organisasi tersebut. Oleh karena itu kinerja individu dalam organisasi merupakan jalan dalam meningkatkan produktivitas organisasi itu sendiri. Kegagalan yang dialami oleh sumber daya manusia dalam memahami serta menerapkan ilmu akuntansi akan memiliki dampak pada laporan keuangan. Seperti adanya kekeliruan laporan yang dibuat dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga kualitasnya menjadi buruk (Soimah, 2014). Hal ini semakin baik kompetensi sumber daya manusia akan semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Meskipun ada kegagalan yang dialami sumber daya manusia setidaknya mereka pernah mengalami pembelajaran dari apa yang mereka kerjakan. Sehingga kesempatan pelatihan untuk membangun kompetensi sumber daya manusia dapat dimanfaatkan.

Dalam rangka peningkatan kualitas informasi pelaporan keuangan, dari tahun 2000-an yaitu, penerapan basis *cash toward accrual* yang dimulai tahun 2005 dan basis akrual yang dilaksanakan oleh seluruh entitas pemerintah pada tahun 2015 secara serentak di Indonesia. Pada tahun 2005, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis *cash toward accrual*. Selanjutnya pada tahun 2010 pemerintah pusat kembali menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis *full accrual*. Didukung dengan ditetapkannya pemendagri nomor 64 tahun 2013 pasal 10 ayat (2) yang menyatakan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015.

Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 membawa perubahan besar dalam sistem laporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual untuk menghasilkan pengakuan kinerja yang lebih baik serta lebih transparan dan akuntabel. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan dalam undang-undang keuangan negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan serta menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban.

Pada tahun 2010, Standar akuntansi pemerintahan (SAP) telah selesai disusun oleh komite standar akuntansi pemerintahan (KSAP) dan ditetapkan sebagai Peraturan Pemerintah dalam PP No. 71 Tahun 2010. Dalam peraturan tersebut, laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah secara bertahap didorong untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dan paling lambat tahun 2015 seluruh laporan keuangan pemerintah daerah sudah menerapkan SAP berbasis akrual. Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah daerah tersebut harus mengikuti SAP sesuai dengan peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010 dengan tujuan agar lebih *accountable* dan kualitas laporan keuangan tersebut semakin berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

Laporan keuangan yang telah dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun komponen yang disampaikan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam PP no. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi empat karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami.

Laporan keuangan tersebut akan diaudit terlebih dahulu oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) untuk diberikan opini dalam rangka meningkatkan kredibilitas laporan. Setelah BPK memberikan opini, laporan keuangan disampaikan kepada pemerintah, DPR/DPRD, investor, kreditor, dan masyarakat pada umumnya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Dalam hal ini BPK dapat memberikan 4 macam opini, yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW), dan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer*). Ketika BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan pemerintah daerah ini menunjukkan laporan keuangan yang dilaporkan oleh pihak daerah sudah memenuhi syarat atau dapat dikatakan laporan keuangan yang disajikan sudah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang terdapat pada PP No. 71 Tahun 2010.

Sering dikaitkan dengan penerapan *new public management* (NPM) yaitu dari perubahan akuntansi berbasis *cash toward accrual* ke *accrual*. Perubahan basis akuntansi ini merupakan salah satu adopsi konsep NPM oleh sektor publik. NPM itu sendiri menuntut pengelolaan keuangan sektor pemerintah agar lebih transparan, akuntabel, dan dapat mengungkapkan informasi-informasi yang relevan sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini selaras dengan tujuan NPM itu sendiri yaitu untuk mengubah informasi publik, khususnya dibidang pengelolaan keuangan sehingga menjadi lebih informatif.

Penelitian mengenai implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual menunjukkan hasil penelitian yang beragam. Hal tersebut terjadi karena perbedaan situasi dan kondisi objek peneliti. Roviyantie (2012) menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan penelitian Juwita (2013) melakukan penelitian pada pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat menunjukkan hasil bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Ningtyas (2015) melakukan penelitian pada pemerintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan hasil bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Syarifudin (2014) hasil penelitian tersebut menghasilkan bahwa kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Peran Auditor Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. SPIP berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap SPIP. Peran Audit Intern berpengaruh signifikan terhadap SPIP. SPIP dapat memediasi pengaruh Kompetensi SDM terhadap kualitas LKPD. SPIP tidak memediasi pengaruh Peran Audit Intern terhadap kualitas LKPD.

Pemerintah kota Surabaya adalah salah satu pemerintah daerah di Indonesia yang telah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual. Berbagai persiapan implementasi akuntansi berbasis akrual telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya antara lain meliputi *updating* kebijakan akuntansi, bimbingan teknis dan *updating* prosedur penatausahaan, *updating* sistem dan prosedur aset atau barang milik daerah, dan kemudian disosialisasikan oleh internal pemerintah kota Surabaya. Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia yang kompeten yang akan mampu memahami logika akuntansi dengan baik.

Kualitas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan bermanfaat

sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. Kualitas laporan keuangan umumnya digunakan dalam keputusan investasi, perjanjian kompensasi dan persyaratan hutang. Laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak diluar suatu entitas. Laporan ini melampirkan sejarah perusahaan yang dikuantitatifkan dengan nilai satuan moneter. Oleh karena itu sumber daya manusia yang kompeten sangat dibutuhkan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Dalam pengelolaan keuangan entitas yang baik, top manajer maupun pegawai harus memiliki latar belakang akuntansi yang baik, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman yang baik dibidang akuntansi.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah, dan untuk menguji pengaruh implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Agency (*Agency Theory*)

Pemerintah demokrasi memiliki hubungan keangenan yaitu hubungan antara pemerintah dan para pengguna informasi keuangan pemerintah. Akuntansi publik menurut Mardiasmo (2010) merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu pertanggungjawaban atas pengolahan dana kepada otoritas yang lebih tinggi (akuntabilitas vertikal), yaitu akuntabilitas ini merujuk pada kemampuan pihak yang berkedudukan dalam posisi non-kepemimpinan untuk menuntut akuntabilitas pada pemimpin. Artinya, status agen lebih tinggi dari principal. Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas (akuntabilitas horizontal), yaitu hubungan akuntabilitas antara agen dan principal dimana keduanya berkedudukan sejajar, atau dapat dikatakan sebagai fungsi dari *check and balance* yang berada dalam pemerintahan.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan penggerak organisasi dalam mewujudkan visi, misi tujuan organisasi. SDM adalah faktor penting demi terciptanya laporan keuangan yang berkualitas. Keberhasilan suatu entitas bukan hanya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang dimilikinya melainkan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan.

Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi akan bekerja dengan pengetahuan dan keterampilan sehingga dapat bekerja dengan mudah, cepat, dan dengan pengalamannya bisa meminimalisir kesalahan. Tiga hal ini juga selaras dengan pengertian kompetensi dalam penjelasan PP No. 101 Tahun 2000 pasal bahwa, yang dimaksud dengan kompetensi adalah kemampuan dari karakteristik yang dimiliki oleh PNS berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Hutapea dan Thoha (2008), mengungkapkan bahwa ada tiga komponen utama pembentukan kompetensi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang, kemampuan dan perilaku individu. Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki seseorang karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang yang digelutinya (tertentu). Pengetahuan karyawan turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, karyawan yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi organisasi. Namun bagi karyawan yang belum

mempunyai pengetahuan yang cukup, maka akan bekerja tersendat-sendat. Keterampilan (*skill*) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada seseorang karyawan dengan baik dan maksimal. Sikap (*attitude*) merupakan pola tingkah laku seorang karyawan/pegawai didalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan organisasi. Apabila karyawan mempunyai sifat yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

***New Public Management* dan Reformasi Akuntansi Sektor Publik**

Fokus *new public management* pada efisiensi menganjurkan seluruh elemen pemerintahan yang mengadopsinya untuk bekerja lebih keras dan bertanggungjawab secara akuntabel kepada masyarakat mengenai sumber daya yang digunakan, sehingga akuntansi melakukan peranan penting dalam perkembangan *new public management* berkaitan dengan pengukuran kinerja penggunaan sumber daya.

Mahmudi (2013) menjelaskan tentang konsep *new public management* yaitu juga memiliki keterkaitan dengan permasalahan manajemen kinerja sektor publik karena pengukuran kinerja menjadi salah satu prinsip *new public management* telah mereformasi pengelolaan sektor publik dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang ada pada sektor publik. Secara ringkas, karakteristik NPM yaitu Manajemen profesional di sektor publik Adanya standar kinerja dan ukuran kinerja Penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome Pemecahan unit-unit kerja disektor publik Menciptakan persaingan disektor publik Pengadopsian gaya manajemen di sektor swasta ke dalam sektor publik Penekanan pada disiplin dan penghematan dalam menggunakan sumber daya

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi sebagai suatu proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi/entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (Halim dan Kusufi, 2012). Akuntansi sebagai aktivitas jasa, yang berfungsi untuk menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, mengenai entitas yang dipandang akan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan pilihan yang tetap diantaranya alternatif tindakan (Smith dan Skousen, 2009).

Nordiawan *et al.* (2007), menyatakan bahwa akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi dibidang pemerintah. Akuntansi pemerintah menyediakan laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan negara, pengendalian atas pengeluaran melalui anggaran negara, termasuk kesesuaiannya dengan Undang-Undang yang berlaku.

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi pemerintah merupakan salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kuitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan (Mahmudi, 2013). Manfaat yang diperoleh dengan adanya standar akuntansi pemerintahan adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur dan menyeluruh kepada pengguna laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan memiliki beberapa manfaat, yaitu Sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Digunakan oleh auditor sebagai kriteria audit untuk menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya. Digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan. Diperlukan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman,

relevansi, dan keandalan laporan keuangan. Sebagai acuan dalam penyusunan sistem akuntansi karena keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi. Afifah (2009) menyatakan standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi pemerintahan daerah mengatur tiga hal, yaitu Pengakuan, Pengukuran, Pengungkapan.

Akuntansi Berbasis Akrua

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas diterima atau dibayar, Halim dan Kusufi (2012) menyimpulkan bahwa basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan.

Kualitas Laporan Keuangan

Informasi dalam laporan keuangan banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut meliputi: Pemerintah, Masyarakat, Para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman. Dimana pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk mengambil suatu keputusan. Keputusan yang dihasilkan diharapkan dapat membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik.

Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian pelaporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan menggunakan standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum. Indikator yang digunakan peneliti untuk mengukur kualitas laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat diperbandingkan, dapat dipahami.

Menurut peraturan pemerintah no. 71 Tahun 2010 laporan keuangan pokok yang harus disusun oleh entitas pemerintah, yaitu laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan Perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Sumber daya manusia adalah seseorang atau individu yang mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan tugas. Kemampuan sumber daya manusia sangat berperan penting dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan hasil laporan yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkaitan langsung dengan sistem akan dituntut untuk memiliki keahlian akuntansi yang cukup memadai atau paling tidak memiliki kemauan untuk terus belajar dan menambah keahlian dibidang akuntansi. Menurut penelitian Syarifudin (2014) melakukan penelitian terhadap 28 SKPD pada pemerintah Kabupaten Kebumen yang menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Roviyantje (2011) menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu

H1: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Pemahaman atas penerapan akuntansi berbasis akrual memegang peranan penting dalam kualitas laporan keuangan. Semakin tinggi tingkat implementasi akuntansi berbasis akrual maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan entitas tersebut. Pemahaman penerapan berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan pelaksanaan pelaporan keuangan telah sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Suatu entitas sektor publik yang memiliki pemahaman yang baik mengenai PP No 71 Tahun 2010 akan mudah menyusun laporan keuangan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut penelitian Juwita (2013) melakukan penelitian pada pemerintah kota/kabupaten di Jawa Barat menunjukkan hasil bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Ningtyas (2015) melakukan penelitian pada pemerintah Kabupaten Sidoarjo menunjukkan hasil bahwa implementasi standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis penelitian ini yaitu

H2 : Implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pada daerah.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pendekatan kuantitatif, yaitu sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). Adapun populasi dari penelitian ini yaitu 19 SKPD dengan jumlah 38 kusioneryang terdiri dari kepala dinas dan kepala bagian keuangan atau akuntansi pada masing-masing dinas dan kantor yang menduduki posisi sebagai pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan SKPD dan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah di SKPD Kota Surabaya yang dilihat pada tabel 1.

Tabel 1
Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya

No.	Instansi	Responden
1	Badan Arsip dan Perpustakaan kota Surabaya	2
2	Badan Kepegawaian dan diklat	2
3	Badan Pengelolaan keuangan dan perpajakan Daerah	2
4	Satuan Polisi Pamong Praja	2
5	Dinas Kesehatan	2
6	Dinas Pendidikan	2
7	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	2
8	Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian	2
9	Dinas perhubungan	2
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	2
11	Dinas Tenaga Kerja	2
12	Dinas Sosial	2
13	Dinas Koperasi dan UMKM	2
14	Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang	2
15	Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota	2
16	Dinas Kebudayaan dan pariwisata	2
17	Dinas Kepemudaan dan Olahra	2
18	Dinas Pengendalian Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2
19	Dinas Lingkungan Hidup	2
Jumlah		38

Sumber: data primer diolah, 2017

Sangadji dan Sopiah (2010) mengungkapkan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini penelitian menggunakan data primer yaitu sumber data yang diperoleh peneliti secara langsung tanpa melalui media perantara. Data primer pada penelitian ini berasal dari hasil kuisisioner atau angket yang diisi oleh responden yaitu kepala dinas, kepala kantor, kepala bagian keuangan yang ada di satuan kerja perangkat daerah kota Surabaya yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti.

Teknik Pengambilan Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Metode ini digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditentukan peneliti (Sekaran, 2006). Kriteria sampel yang akan digunakan adalah karyawan yang berada pada tingkat *middle management* ke atas yang menduduki posisi sebagai pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan SKPD dan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya.

Berdasarkan penelitian ini menganalisis 19 SKPD dengan jumlah 38 responden yang terdiri dari kepala dinas dan kepala bagian keuangan atau akuntansi pada masing-masing dinas dan kantor yang menduduki posisi sebagai pihak yang terlibat langsung secara teknis dalam pencatatan transaksi keuangan SKPD dan penyusunan pelaporan keuangan pemerintah daerah di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya yang dilihat pada tabel 1. Hal ini dikarenakan judul penelitian ini mengacu pada kompetensi sumber daya manusia dan penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, sehingga hasil jawaban dari responden akan jauh dari sifat bias. Menurut Roscoe (1982) dalam Sugiyono (2013) memberikan saran tentang ukuran sampel untuk penelitian adalah ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.

Teknik Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh seseorang, dan bukan peneliti yang melakukan studi mutakhir (Sekaran, 2006). Penghimpunan data dalam pengamatan dilakukan dengan teknik dokumenter, yaitu teknik penghimpunan data baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Kemudian data yang berhasil dihimpun akan dianalisis, dibandingkan dan diuji membentuk suatu penelitian yang sistematis.

Data dalam penelitian ini berupa kuisisioner. Kuisisioner ini dibagikan pada kepala dinas, kepala kantor, dan kepala bagian keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Surabaya. Kuisisioner diberikan secara langsung kepada responden. Responden diminta untuk mengisi daftar pertanyaan tersebut, kemudian dikembalikan secara langsung kepada peneliti.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Konsep dasar dari definisi operasional mencakup pengertian untuk mendapatkan data yang akan dianalisis dengan tujuan untuk mengoperasionalkan konsep-konsep penelitian menjadi variabel penelitian serta cara pengukurannya. Variabel-variabel yang diteliti yaitu kompetensi sumber daya manusia, implementasi akuntansi berbasis akrual, dan kualitas laporan keuangan daerah.

Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM)

Kompetensi sumber daya manusia merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakannya tuganya secara profesional, efektif dan efisien. Indikator variabel ini yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), sikap (*attitude*)

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuisisioner, yang diambil dari penelitian Sudiarianti (2014) dengan model skala likert lima poin. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau tidak setujuannya terhadap 9 pertanyaan ada variabel kompetensi sumber daya manusia yang akan diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua (IABA)

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk mengakui pendapatan, beban, aset kewajiban, dan ekuitas. Basis akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual dapat menunjukkan bagaimana Pemerintah membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan dananya, lebih memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas dan memenuhi kewajibannya, serta lebih riil menunjukkan posisi keuangan pemerintah dan perubahan posisi keuangan.

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuisisioner, yang diambil dari penelitian Ningtyas (2015) dengan model Likert lima poin. Responden diminta untuk menyatakan setuju atau tidak setujuannya terhadap 6 pertanyaan ada variabel implementasi akuntansi berbasis akrual yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, dalam variabel ini peneliti menggunakan 3 indikator, yaitu pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Kualitas Laporan Keuangan Daerah (KLKD)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Surabaya. Kualitas laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 laporan keuangan pokok yang harus disusun oleh entitas pemerintah, meliputi laporan keuangan anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan.

Responden diminta untuk menyatakan setuju atau tidak setujuannya terhadap 10 pertanyaan pada variabel kualitas laporan keuangan daerah (KLKD) yang diajukan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Kuisisioner diambil dari penelitian Sudiarianti (2014).

Teknik Analisis Data

Uji Validitas

Sekaran (2006), validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keabsahan dan kevalidan suatu alat ukur atau instrumen peneliti. Uji validitas bertujuan untuk mengukur apa yang ingin diukur atau alat ukur yang digunakan mengenaisasaran. Validitas pernyataan-pernyataan yang telah disiapkan dapat diukur dengan mengkorelasi skor setiap pertanyaan dengan jumlah skortotalnya. Syarat minimum untuk memenuhi validitas adalah apabila $r = 0,3$. Jika korelasi antar butir dengan skor total kurang dari 0,3 maka instrumen tersebut dinyatakan tidak valid (Sugiyono, 2013).

Uji Reliabilitas

Reliabilitas dapat diartikan tentang sejauh mana suatu pengukuran dapat memberikan suatu hasil yang relatif sama, jika dilakukan pengukuran kembali pada subyek peneliti yang sama, relatif sama berarti tetap adanya toleransi terhadap perbedaan-perbedaan kecil di antara hasil beberapa kali pengukuran, atau dengan kata lain jika jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten dari waktu ke waktu. Reliabilitas adalah derajat ketepatan, ketelitian atau keakuratan yang ditunjukkan oleh instrumen pengukuran. Pengujian reliabilitas dengan menggunakan metode *Alfa Cronbach*, dengan kriteria *Alfa Cronbach* dari masing-masing variabel lebih dari 0,60 maka alat ukur dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel.

Uji Normalitas

Pengujian normalitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik mempengaruhi *kolmogrov-smirnov* (K-S). Jika hasil *kolmogrov-smirnov* menunjukkan hasil signifikan di atas 0,05 maka data residual terdistribusi dengan normal. Sedangkan jika hasil *kolmogrov-smirnov* menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05 maka data residual terdistribusi tidak normal (Ghozali, 2013).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Untuk menguji keberadaan autokorelasi dalam penelitian ini digunakan uji statistik *Durbi Watson* (DW) dengan ketentuannya yaitu angka DW di bawah -2 berarti terjadi autokorelasi positif, angka DW diantara -2 sampai +2 berarti tidak terjadi autokorelasi, angka DW diatas +2 berarti terjadi autokorelasi negatif.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2013). Uji multikolinieritas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel bebas (independen) harus terbebas dari gejala multikolinieritas atau tidak terjadi korelasi antarvariabel independen.

Dasar pengambilan keputusan dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) seperti yang digunakan (Ghozali, 2013) jika nilai *Tolerance* di atas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10, maka tidak terjadi masalah multikolinieritas, artinya model regresi tersebut baik. Kemudian Jika nilai *Tolerance* dibawah 0,1 dan nilai VIF diatas 10, maka terjadi masalah multikolinieritas, artinya model regresi tersebut tidak baik.

Uji Heterokedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara lain prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residunya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur

dan data tersebut secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).

Pengujian Regresi Linier Berganda

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan metode analisis regresi yaitu metode regresi linier berganda. Penulis menggunakan metode regresi linier berganda karena dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen. Metode regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus metode analisis regresi linier berganda yaitu sebagai berikut :

$$KLKD = \alpha + \beta_1 KSDM + \beta_2 IABA + \varepsilon$$

Keterangan :

KLKD = Kualitas Laporan Keuangan Daerah

α = Konstanta

KSDM = Kompetensi Sumber Daya Manusia

IABA = Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua

ε = error

Uji Kesesuaian Model (*Goodness of fit*)

Pengujian kesesuaian model (*goodness of fit*) digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual. Pengujian kesesuaian model dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penetapan model penelitian pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan implementasi akuntansi berbasis akrua terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil dari pengujian kesesuaian model ini terdapat pada output SPSS yang dapat dilihat pada tabel ANOVA yang menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan melakukan perbandingan antara *p-value* pada kolom signifikan dengan *level of significant*.

Uji Statistik (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013). Uji statistik t ini digunakan karena untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi. Cara untuk mengetahuinya yaitu dilakukan dengan melihat *p-value* dari masing-masing variabel. Hipotesis diterima apabila *p-value* < 5% (Ghozali, 2013).

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (*R Square*) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen (Ghozali, 2013).

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai *adjusted R Square* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Jika R^2 mendekati 1 (semakin besar R^2), menunjukkan bahwa sumbangan atau kontribusi variabel independen terhadap variabel secara simultan kuat. Jika R^2 mendekati 0 (semakin kecil nilai R^2), menunjukkan bahwa sumbangan variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan lemah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif menunjukkan nilai minimum, maksimum, dan rata-rata dari setiap variabel. Hasil uji statistik deskriptif disajikan pada tabel 2.

Tabel 2
Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kompetensi Sumber Daya Manusia	38	3,00	5,00	4,0987	,46331
Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua	38	3,00	5,00	4,2281	,53891
Kualitas Laporan Keuangan Daerah	38	3,30	5,00	4,3289	,47358
Valid N (listwise)	38				

Sumber: data primer diolah, 2017

Hasil pengujian statistik deskriptif pada tabel 2 diperoleh bahwa variabel KSDM memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 4,0987 dan nilai standar deviasi sebesar 0,46331, variabel IABA memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 4,2281 dan nilai standar deviasi sebesar 0,53891, dan variabel KLKD memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 4,3289 dan nilai standar deviasi sebesar 0,47358. Sehingga nilai rata-rata variabel kompetensi sumber daya manusia dan implementasi akuntansi berbasis akrual mempunyai pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Hasil pengujian validitas masing-masing variabel disajikan pada tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
KSDM	KSDM1	0,767	0,2709	Valid
	KSDM2	0,832	0,2709	Valid
	KSDM3	0,862	0,2709	Valid
	KSDM4	0,858	0,2709	Valid
	KSDM5	0,856	0,2709	Valid
	KSDM6	0,676	0,2709	Valid
	KSDM7	0,706	0,2709	Valid
	KSDM8	0,752	0,2709	Valid
IABA	IABA1	0,764	0,2709	Valid
	IABA2	0,933	0,2709	Valid
	IABA3	0,883	0,2709	Valid
	IABA4	0,871	0,2709	Valid
	IABA5	0,775	0,2709	Valid
	IABA6	0,922	0,2709	Valid
KLKD	KLKD1	0,66	0,2709	Valid
	KLKD2	0,847	0,2709	Valid
	KLKD3	0,829	0,2709	Valid
	KLKD4	0,776	0,2709	Valid
	KLKD5	0,548	0,2709	Valid
	KLKD6	0,566	0,2709	Valid
	KLKD7	0,804	0,2709	Valid
	KLKD8	0,812	0,2709	Valid
	KLKD9	0,853	0,2709	Valid
	KLKD10	0,897	0,2709	Valid

Sumber: data primer diolah, 2017

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan reliabel atau handal. Untuk mengukur reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini maka digunakan nilai Cronbach's Alpha. Suatu konstruk atau variabel yang dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,6 (Ghozali, 2013). Hasil pengujian reliabilitas disajikan pada tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Realiabilitas
Reliability Statistics

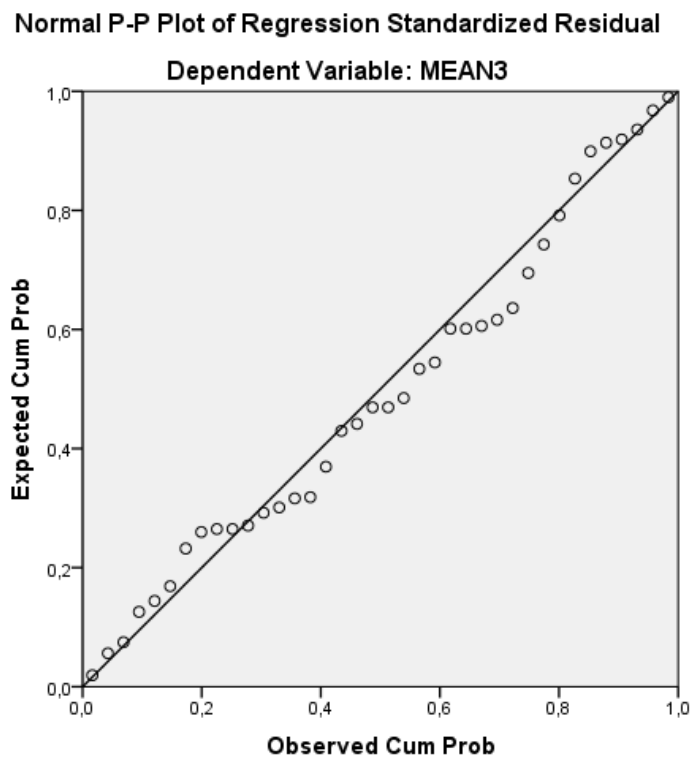
Variabel Pnelitian	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
KSDM	,787	9	Reliabel
IABA	,808	7	Reliabel
KLKD	,776	11	Reliabel

Sumber: data primer diolah, 2017

Hasil output pada tabel 4 menunjukkan bahwa masing-masing item pertanyaan variabel kompetensi sumber daya manusia (KSDM), implementasi akuntansi berbasis akrual (IABA) dan kualitas laporan keuangan daerah (KLKD) memiliki nilai diatas 0,6, maka dapat dikatakan reliabel. Dengan demikian syarat reliabilitas terpenuhi.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi, varibel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dengan melihat *probability plot*.



Sumber: data primer diolah, 2017

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan grafik hasil uji normalitas pada Gambar 1 dapat disimpulkan bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.

Selain menggunakan analisis grafik, uji normalitas juga dapat dilihat dari uji statistik yaitu *Kolmogorov Smirnov* dengan nilai residual hasil regresi dengan kriteria jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka berdistribusi normal, namun apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka berdistribusi tidak normal.

Tabel 5
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		38
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,32959577
Most Extreme Differences	Absolute	,097
	Positive	,097
	Negative	-,070
Test Statistic		,097
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: data primer diolah, 2017

Berdasarkan hasil *Kolmogorov-Smirnov*, dapat dilihat bahwa nilai Asymp Sig sebesar $0,200 > 0,05$ yang berarti bahwa model regresi telah terdistribusi secara normal dan dapat digunakan dalam penelitian.

Uji Multikolinier

Uji pengujian multikolinier dilakukan dengan melihat nilai *variance inflation factor*(VIF). Apabila nilai tolerance mendekati 1, serta nilai VIF disekitar angka 1 dan tidak lebih dari angka 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. Berikut hasil pengujian multikolinier dengan menggunakan software SPSS yang disajikan pada tabel 6.

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinier
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
KSDM	,546	1,833
IABA	,546	1,833

a. Dependent Variable: KLKD

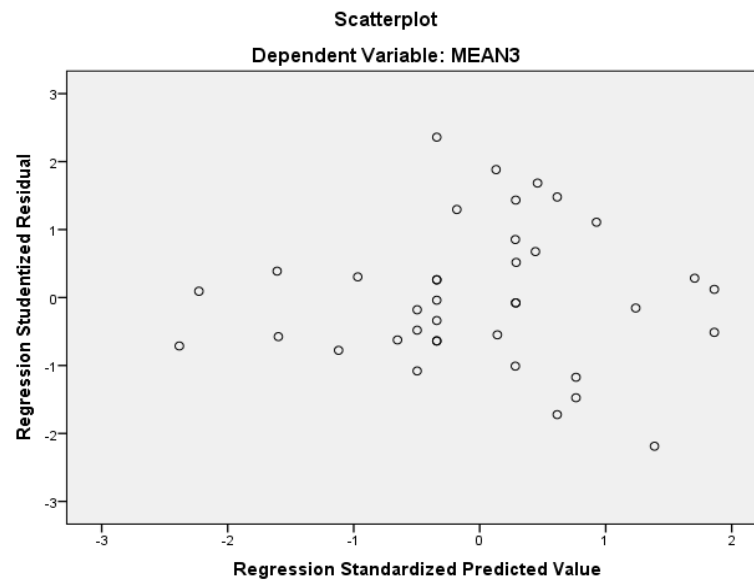
Sumber: data primer diolah, 2017

Berdasarkan hasil dari tabel diatas diketahui hasil perhitungan nilai tolerance untuk masing-masing variabel menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai

tolerance mendekati 1 Hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai VIF < 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antara variabel independen dalam model regresi.

Uji Heterokedastisitas

Pengujian heterokedastian bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2011). Pengujian dilakukan dengan melihat pada grafik *Scatter Plot* antara SRESID dan ZPRED.



Sumber: data primer diolah, 2017

Gambar 2
Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik titik menyebar diatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

Pengujian Regresi Linier Berganda

Analisis regresi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia (KSDM), implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. Berikut ini analisis yang diperoleh dari SPSS yang disajikan pada tabel 7.

Tabel 7
Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	1,217	,516		2,360	,024
KSDM	,424	,163	,415	2,604	,013
IABA	,325	,140	,370	2,322	,026

a. Dependent Variable: MEAN3
Sumber: data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel 7 diatas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$KLKD = 1,217 + 0,424 KSDM + 0,325 IABA$$

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Dapat dilihat pada tabel 8 adalah hasil koefisien determinasi.

Tabel 8
Hasil Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,718 ^a	,516	,488	,33888	1,755

Sumber: data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai koefisien determinasi untuk model regresi sebesar 0,516 yang berarti bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (KSDM) dan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua (IABA) sebesar 51,6% Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Uji Kesesuaian (*goodness of fit*)

Uji statistik F digunakan untuk menguji kesesuaian model (*goodness of fit*). Sehingga dapat dilihat apakah model masuk dalam kategori cocok (*fit*) atau tidak. Dapat dilihat pada 9 adalah hasil Uji F.

Tabel 9
Hasil Kesesuaian (*goodness of fit*)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	4,279	2	2,139	18,629	,000 ^b
Residual	4,019	35	,115		
Total	8,298	37			

Sumber: data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas diketahui angka F yaitu 18,629 dengan Sig. 0,000 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia dan implementasi akuntansi berbasis akrua secara simultan memiliki pengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan daerah, sehingga dalam hal ini model layak memenuhi *goodness of fit*.

Uji Statistik t (Uji t)

Uji statistik t_{hitung} digunakan untuk menguji pengaruh secara persial (per variabel) terhadap variabel dependen . Sehingga apakah variabel tersebut memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel dependen atau tidak. Dapat dilihat pada 10 adalah hasil Uji t sebagai berikut.

Tabel 10
Uji Statistik t (Uji t)
Coefficients^a

Model	T	Sig.
1 (Constant)	2,360	,024
KSDM	2,604	,013
IABA	2,322	,026

Sumber: data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel diatas diperoleh hasil uji statistik t yang menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi sumber daya manusia (KSDM) terhadap kualitas laporan keuangan daerah (KLKD) menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,013 < 0,05$. Sehingga variabel kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. sedangkan pengaruh implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap Kualitas laporan keuangan daerah (KLKD) menghasilkan nilai signifikansi sebesar $0,026 < 0,05$. Sehingga variabel implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pembahasan

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Dari hasil pengolahan data ststistik menyatakan hipotesis pertama (H_1) diterima yaitu kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sehingga semakin meningkatnya kompetensi sumber daya manusia akan meningkat pula kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan. Untuk itu peran sumber daya manusia yang berkompentensi sangat mempengaruhi hasil laporan keuangan.

Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai organisai tersebut. Kompetensi yaitu keterampilan, pengetahuan, sikap dasar serta nilai yang dicerminkan ke dalam kebiasaan berpikir dan bertindak yang sifatnya berkembang, dinamis, kontinyu (terus menerus) serta dapat diraih setiap waktu. Kebiasaan berfikir serta bertindak dengan konstan, konsisten dan diteruskan secara terus menerus akan membuat seseorang menjadi kompeten.

Laporan keuangan yang berkualitas mempunyai faktor-faktor untuk menghasilkan laporan keuangan yang baik. Salah satunya adalah kompetensi sumber daya manusia, karyawan yang mempunyai keterampilan maupun kemampuan lebih tinggi memungkinkan untuk memberikan hasil dengan kompetensi yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Roviyantie (2012) dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang bagus maka peranan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan organisasi akan berjalan dengan baik. Tugas yang dibebankan kepada sumber daya manusia tersebut dapat terselesaikan secara profesional, efektif dan efisien. Waktu pembuatan laporan keuangan dapat hemat, sehingga laporan keuangan disajikan dengan tepat pada waktunya. Serta mendorong terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas dan bebas dari salah saji yang material.

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bastian (2014) bahwa dengan adanya kompetensi staf akuntansi yang memadai memungkinkan terwujudnya laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standar akuntansi akuntansi pemerintah. Jika standar akuntansi pemerintah dilaksanakan dengan baik oleh sumber daya manusia, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Semakin kompeten sumber daya manusia pembuat laporan keuangan, maka semakin baik pula laporan keuangan yang dihasilkan SKPD. Dengan demikian kompetensi sumber daya manusia ditunjukkan agar penyelenggara tugas dan fungsi organisasi dalam menghasilkan laporan keuangan berkualitas dapat diterapkan.

Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan pendapat yang disampaikan oleh (Syarifudin, 2014) Berdasarkan hasil penelitian tersebut menghasilkan bahwa Kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas LKPD. Hasil penelitian tersebut diteliti

pada Pemerintah Kabupaten Kebumen. Artinya, kompetensi sumber daya manusia di Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak mempengaruhi laporan keuangan Pemerintah Daerah Kebumen.

Pengaruh Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaI Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Dari hasil pengolahan data statistik menyatakan hipotesis kedua (H_2) diterima yaitu implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sehingga semakin baik implementasi akuntansi berbasis akrual maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan. Maka dari itu tingkat penerapan akuntansi berbasis akrual selalu dijalankan agar kualitas laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang andal, relevan dan dapat dipahami.

Standar akuntansi pemerintah merupakan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah yang berbasis akrual adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan (PP No. 71 Tahun 2010).

Penerapan akuntansi berbasis akrual yang dikemukakan oleh Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 bertujuan sebagai acuan dalam penyusunan sistem akuntansi karena keluaran sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi. Sehingga implementasi akuntansi berbasis akrual manfaatnya akan berkepanjangan. Karena itu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 diciptakan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kegunaannya bagi Pemerintah, masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman.

Menurut Halim dan Kusufi (2012) menyimpulkan bahwa basis akrual mampu memenuhi tujuan pelaporan yang tidak dapat dipenuhi oleh basis kas, tujuan pelaporan tersebut adalah tujuan manajerial dan pengawasan. Dari pernyataan tersebut, basis akrual lebih mampu memberikan kualitas laporan keuangan yang informatif, terbuka, jujur dan menyeluruh kepada pengguna laporan keuangan.

Pengaruh standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sejalan dengan pendapat Mahmudi (2013) standar akuntansi pemerintahan merupakan aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Penerapan standar akuntansi pemerintah yang baik diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas laporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. Kualitas laporan yang baik akan berdampak pada tata kelola pemerintahan yang baik.

Hal ini selaras dengan penelitian Wati *et al.* (2014) bahwa dengan adanya penerapan standar akuntansi pemerintahan maka transaksi yang dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku yaitu dengan basis akrual dan disajikan secara jujur, lengkap dan dapat mengurangi kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan keuangan serta dapat dipertanggung jawabkan, dalam hal ini laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dan dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Jika standar akuntansi pemerintahan telah dipahami maka akan dapat menyajikan laporan keuangan dengan benar. Standar akuntansi pemerintahan dengan basis akrual telah diterapkan dengan baik, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dipercaya serta dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan kompetensi sumber daya manusia pada Satuan Kerja perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya sudah berkompeten, serta implementasi akuntansi berbasis akrual sudah efektif, sedangkan kualitas laporan keuangan daerah Kota Surabaya pun sudah sangat berkualitas. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap kuisioner yang dibagikan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya, maka dapat disimpulkan yaitu kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin baik kompetensi sumber daya manusia, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan daerah. Implementasi akuntansi berbasis akrual berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa, semakin tinggi implementasi akuntansi berbasis akrual, maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan daerah

Saran

Berdasarkan simpulan yang ada tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan daerah, adapun saran yang dapat disampaikan pertama untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah kota Surabaya disarankan kepada sumber daya manusia atau staf yang sudah berkompeten dengan mengikuti kegiatan sosialisasi standar akuntansi pemerintah diharapkan tidak berpindah ke bagian lain menggantikan dengan karyawan baru, sehingga kualitas dari laporan keuangan tersebut tetap terjaga kualitas nya dan bisa semakin meningkat lagi. Kedua Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat menambahkan variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Dikarenakan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,516 atau 51,6%, sehingga sisanya yaitu 49,4% dapat dijelaskan variabel lain diluar model, seperti pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah. Ketiga selain itu untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperluas subjek penelitian, tidak terfokus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Surabaya melainkan menambahkan subjek penelitian pada Badan Pengelola Keuangan (BPK) Selaku pemeriksa laporan keuangan daerah. Sehingga kualitas laporan keuangan yang diteliti akan semakin kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N.N. 2009. *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Bastian, I.2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga, Jakarta.
- Ghozali.2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM 21 Update PLS Regresi*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. dan M. S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Empat. Erlangga, Jakarta.
- Hutapea, P. dan N. Thoha. 2008. *Kompetensi Plus*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Juwita, R. 2013. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah dan Sitem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Trikonomika* 12(2): 201-214.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Tentang Standar Akuntansi pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah*. Jakarta.
- Mahmudi. 2013. *Akuntansi Ssektor Publik*. UII Press. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.

- Ningtyas, P. E. 2015. Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 13 Juni 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49. Jakarta.
- _____. Nomor 71 tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- _____. Nomor 101 Tahun 2000 *Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil*. 10 November 2000. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198. Jakarta.
- Roviyantie, D. 2012. Pengaruh Kompetensi Sumberdaya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Taikmalaya). *Skripsi*. Universitas Siliwangi. Bandung.
- Sangadji, E. M. dan Sopiah. 2010. *Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. C.V ANDI OFFSET. Yogyakarta.
- Sekaran, U. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Selemba Empat. Jakarta.
- Smith dan Skounsen. 2009. *Akuntansi Keuangan*. Selemba Empat. Yogyakarta.
- Soimah, S. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. *Skripsi*. Universitas Bengkulu.
- Sudiarianti. N. M. 2014. Pengaruh Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Implikasinya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Thesis*. Universitas Udyana. Bali.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi; Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta.
- Syarifudin, A. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM dan Peran Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Studi Empiris pada Pemkab Kebumen). *Jurnal Fokus Bisnis*. 14(02).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004. *Perbendaharaan Negara*. 14 Januari 2004. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355. Jakarta.
- Wati, K, D., N. T. Herawati. dan N. K. Sinarwati. 2014. Pengaruh SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Skripsi*. Universitas Pendidikan Ganesha. Bali